

**TESIS**

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN  
HUKUM TERHADAP PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS**



**Disusun Oleh:  
Siska Andriani  
NIM. 2020216320027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2023**

**TESIS**

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN  
HUKUM TERHADAP PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS**

**Disusun Oleh:  
Siska Andriani  
NIM. 2020216320027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2023**

Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal .....

**PEMBIMBING UTAMA**



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum**

**NIP. 19600418 198603 1 002**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M**

**NIP. 19820610 200501 1 002**

**Diketahui oleh**

an. Dekan Fakultas Hukum ULM  
Koordinator Program Studi Kenotariatan,



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19730420 200312 2002**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Andriani, S.H

NIM : 2020216320027

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN  
HUKUM PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024

Yang membuat Pernyataan

Siska Andriani, S.H

**RINGKASAN**  
**PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM**  
**TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

oleh :

<sup>1</sup>Siska Andriani, S.H. <sup>2</sup> Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. <sup>3</sup> Dr. Saprudin,  
S.H., LL.M.

**Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 144 Halaman**  
**Email : siskaandriani1102@gmail.com**

Salah satu perbuatan hukum yang memerlukan peran notaris adalah pendirian dari Perseroan Terbatas. Pembuatan akta pendirian pada perseroan terbatas merupakan salah satu persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan dalam pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 Ayat (1). Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan baru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/online melalui OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2018). PP Nomor 24 Tahun 2018 ini menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Maka, semenjak diberlakukannya sistem perizinan berusaha terpadu secara elektronik tersebut setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS). Peran Notaris muncul dalam memberikan penyuluhan terkait perizinan melalui sistem OSS dengan memastikan kebenaran data kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimasukkan dalam sistem-sistem tersebut sehingga dapat diintegrasikan ke sistem *Online Single Submission* ketika penghadap hendak dilakukan pendaftaran perizinan berusaha. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas semisal dalam memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, baik kesalahan informasi data dalam akta, maka berakibat pada permohonan Nomor Induk Berusaha dapat ditolak oleh instansi terkait, Hal ini menyebabkan izin usaha dan izin operasional untuk badan usaha yang akan didirikan juga tidak bisa diajukan. Terlebih lagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin yang sesuai dapat dikenakan sanksi. Demikian berarti peran notaris dalam hal ini amat diperlukan. Munculnya peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pemilihan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pendirian Perseroan Terbatas memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana penyuluhan hukum yang dapat diberikan notaris dan akibat hukum jika notaris tidak melakukan penyuluhan hukum tersebut.

---

<sup>1</sup> 2020216320027

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang mendirikan perseroan terbatas atau tidak. dan mengetahui serta menganalisis akibat hukum bagi notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang mendirikan perseroan terbatas..

Jenis penelitian hukum yang dilakukan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum dari penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan dan hukum sekunder yang di dapat dari penelitian kepustakaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum mengenai hal kekaburan hukum (*Vage Norm*), yaitu aturan dari peraturan perundang-undangan dari pokok permasalahan sudah ada namun belum jelas.

Hasil penelitian: Pertama, Notaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang mendirikan perseroan terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, bentuk tanggung jawab tersebut bukan dalam ranah suatu kewajiban hanya berupa kewenangan semata, sehingga dalam hal ini jika notaris tidak menjalankan kewenangannya pun dalam memberikan penyuluhan hukum tidak akan memberikan pengaruh terhadap akta yang dibuatnya

Kedua, Tidak ada sanksi bagi Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terhadap penghadap yang mendirikan Perseroan Terbatas. Hal ini karena penyuluhan hukum bukan merupakan kewajiban bagi Notaris. Tapi, apabila Notaris salah dalam mengisi kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada akta pendirian Perseroan Terbatas yang disebabkan kelalaian notaris maka, Notaris bisa disanksi secara administratif dan secara perdata

# **PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**Oleh:**

**<sup>1</sup>Siska Andriani, S.H. <sup>2</sup>Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
<sup>3</sup>Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**

**Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 144 halaman**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Peran Notaris, Penyuluhan Hukum, Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018) menyatakan pendaftaran perseroan terbatas dilakukan melalui sistem OSS. Diketahui Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik salah satunya adalah terkait Pendirian dari Perseroan Terbatas, selain dalam membuat akta otentik notaris juga memiliki kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Berkembangnya proses pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 membuat notaris juga harus mampu mengikuti perubahan dengan memahami dengan baik system OSS terkhusus pada pendaftaran KBLI, demikian berarti peran notaris dalam hal ini amat diperlukan hal ini juga mengingat kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum. Munculnya peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pendirian Perseroan Terbatas memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana penyuluhan hukum yang dapat diberikan notaris dan akibat hukum jika notaris tidak melakukan penyuluhan hukum tersebut. Metode Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan Notaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang mendirikan perseroan terbatas sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, bentuk tanggung jawab tersebut bukan dalam ranah suatu kewajiban hanya berupa kewenangan semata, sehingga dalam hal ini jika notaris tidak menjalankan kewenangannya pun dalam memberikan penyuluhan hukum tidak akan memberikan pengaruh terhadap akta yang dibuatnya. Tidak ada sanksi bagi Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terhadap penghadap yang mendirikan Perseroan Terbatas. Hal ini karena penyuluhan hukum bukan merupakan kewajiban bagi Notaris. Tapi, apabila Notaris salah dalam mengisi kode KBLI pada akta pendirian Perseroan Terbatas yang disebabkan kelalaian notaris maka, Notaris bisa disanksi secara administratif dan secara perdata.

---

<sup>1</sup> 2020216320027

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping

**THE ROLE OF THE NOTARY IN PROVIDING LEGAL COUNSELING  
REGARDING THE ESTABLISHMENT OF LIMITED COMPANIES**

**By:**

**<sup>1</sup>Siska Andriani, S.H. <sup>2</sup>Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**

**<sup>3</sup>Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**

***Lambung Mangkurat University Notary Studies, 144 pages***

**ABSTRACT**

***Keywords: Role of Notary, Legal Counseling, Limited Liability Company***

*Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services (PP Number 24 of 2018) states that limited liability company registration is carried out through the OSS system. It is known that Notaries have the authority to make authentic deeds, one of which is related to the Establishment of Limited Liability Companies. Apart from making authentic deeds, notaries also have the authority to provide legal counseling as stated in Article 15 paragraph (2) letter e of the Law on the Position of Notaries. The development of the process of establishing Limited Liability Companies in accordance with PP Number 24 of 2018 means that notaries must also be able to keep up with changes by understanding the OSS system, especially for KBLI registration, this means that the role of notaries in this matter is very necessary, this is also considering the authority of notaries in providing legal education. The emergence of the role of Notaries in providing legal counseling regarding the establishment of Limited Liability Companies raises questions regarding the extent of legal counseling that can be provided by notaries and the legal consequences if the notary does not provide such legal counseling. This legal research method is normative legal research. The approach in this research is a statutory and conceptual approach. The results of this research state that Notaries are responsible and have the authority to provide legal counseling to parties establishing limited liability companies in accordance with Article 15 paragraph (2) letter e of the Law on the Position of Notaries. However, this form of responsibility is not within the realm of an obligation, only in the form of authority alone, so that in this case, if the notary does not exercise his authority in providing legal counseling, it will not have any influence on the deed he makes. There are no sanctions for Notaries who do not provide legal counseling to applicants establishing Limited Liability Companies. This is because legal counseling is not an obligation for Notaries. However, if the Notary makes a mistake in filling in the KBLI code in the deed of establishment of the Limited Liability Company due to the notary's negligence, the Notary can be sanctioned administratively and civilly.*

---

<sup>1</sup> 2020216320027

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush sholihah, segala puji bagi Allah Subhannahu wa ta'ala, ucapan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhannahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Penelitian ini peneliti persembahkan untuk :

1. Suami tercinta Adenan Muntazirie, S.T., atas segala dukungan, motivasi, perhatian, kasih sayang dan doa serta kesabaran menemani saya dalam lika-liku perjalanan untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) ini, serta buah hati tercinta Xaviera Maryam Muntaz.
2. Orangtua tercinta Abi H. Muhammad Noor Suriadi, S.H dan Umi Hj. Rukayah (Rahimakumullah) serta Mertua tercinta Abah H. Iskandar Zulkarnain dan Mama Hj. Ne'mah Nawawi yang telah memberikan semangat, do'a dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;
3. Saudara-saudari tercinta peneliti Andri Hidayat, Fatimah Ishaq, Shofia Nur Azizah, Nabila Izata Sabrina, Nur Ramdhani, Zaskia Amara Dhiva dan Nabila Ramadhani serta keponakan tercinta Syahila Elmira dan Muhammad Fadhil Abbas yang telah memberikan dukungan moril dan materiil.

Banjarmasin, Januari 2024

Peneliti,

Siska Andriani

NIM. 2020216320027

## UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush sholihaat, segala puji bagi Allah Subhannahu wa ta'ala, ucapan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhannahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis di Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul: PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari banyak pihak, oleh sebab itu pada lembaran ini peneliti dengan hormat menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H** selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak **Prof.Dr.H.M.Hadin Muhjad,S.H.,M.Hum** selaku Pembimbing Ketua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penelit sehingga dapat terselesaikannya tesis ini;
4. Bapak **Dr. Saprudin, S.H.,LL.M** selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya selama penulis menempuh jenjang pendidikan Strata-2 (S2);
6. Seluruh staf Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat khususnya staf Akademik yang membantu memberikan informasi dan bantuan dalam masa perkuliahan;

7. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat khususnya angkatan 2020;

Semoga Allah Subhannahu wa ta'ala membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada Peneliti dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Banjarmasin, Januari 2024

Peneliti,

Siska Andriani

NIM. 2020216320027

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	iii
RINGKASAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Penulisan .....	36
BAB II PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS	
A. Sistem <i>Online Single Submission</i> dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) .....	37
B. Tugas dan Kewenangan Notaris Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	52
C. Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum pada Pendirian Perseroan Terbatas pada Sistem <i>Online Single Submission</i> .....	72

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT PENYULUHAN HUKUM PADA	
Pendirian Perseroan Terbatas	
A. Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) .....	84
B. Akibat Hukum Kesalahan Mengisi Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia .....	112
C. Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Penghadap Atau Penghadap Yang Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) .....	127
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	137
DAFTAR PUSTAKA	